POLITIK ETNIS MINORITAS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MAKASSAR

MUH. ALIF FAUZAN SYAH

E041201029

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

KOTA MAKASSAR

2024

POLITIK ETNIS MINORITAS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MAKASSAR

MUH. ALIF FAUZAN SYAH

E041201029

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

KOTA MAKASSAR

2024

POLITIK ETNIS MINORITAS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MAKASSAR

MUH. ALIF FAUZAN SYAH

E041201029

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Departmen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pada

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

KOTA MAKASSAR

2024

POLITIK ETNIS MINORITAS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MAKASSAR

MUH. ALIF FAUZAN SYAH
E041201029

Skripsi,

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana Pada tanggal, bulan, tahun dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pada 06 Mei 2024

Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Kota Makassar

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Gustiana A Kambo, S.IP.,M.Si
NIP. 197308131998022001

Pembimbing Pendamping

Dr. Muh. Imran, S.IP .,M.Si.
NIP. 19680508 202204 3 001

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Sakinah Nadir, S.IP .,M.Si.
NIP. 19791218 200812 2 002

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN KELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi Politik Etnis minoritas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama, Dr. Gustiana A Kambo,S.IP M.Si dan Dr. Muh. Imran, S.IP., M.SI selaku Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 06 Mei 2024

Muh. Alif Fauzan Syah

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul "**POLITIK ETNIS MINORITAS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MAKASSAR**" pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada program studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karenanya kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih diiringi do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada kedua orang tua penulis Fahyuddin, AP, MH. dan Sunarti, S.ST. yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan, memberikan dukungan, dan pengertiannya kepada penulis untuk terus belajar demi menyelesaikan studi tanpa mengenal rasa lelah, pamrih, suka maupun duka. Kepada Kakak penulis Yulia Fachrunnisa dan Adik penulis Rayhan Fahrizal Yusuf yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis untuk menyelesaikan studi, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan perhatian yang baik selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Sakinah Nadir.S.IP., M.Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada periodenya yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada saya selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Alm. Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada periodenya yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada saya selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
5. Dr. Gustiana A kambo, S.IP., M.Si. selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman kepada saya dan memberi masukan, arahan, dan nasihat dalam membimbing penulisan skripsi saya;
6. Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si. Selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing II saya yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu pengetahuan dan berbagai pengalaman kepada saya dan memberi masukan, arahan, dan nasihat dalam membimbing penulisan skripsi saya;
7. Prof. Dr. Muhammad, M.Si..dan Endang Sari. S.IP., M.Si. selaku penilai/penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;

8. Kepada Anak Balanda: Ryan, Desi, Asdin, Omber, Dhani, Oji, Misykat, Daffa yang senantiasa menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan Skripsi ini;
9. Kepada Luthfi, Regina, Feby, Aura, Fiona, Ratih, Nafira, Pangeran, Raehan yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam suka dan duka untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. kepada rekan/kerabat yang tidak dapat saya sebutkan satu- persatu yang juga tak henti-hentinya memberikan support kepada saya.
11. *Dan yang terakhir, Saya sendiri Muh. Alif Fauzan Syah Terima kasih untuk sudah berjuang sampai hari ini, Terima kasih sudah berusaha dengan segala kekurangan,, Terima Kasih untuk tidak pernah menyerah sampai titik ini, Terima Kasih untuk tetap menjadi Diri sendiri. Terima kasih untuk selalu bersyukur, Terima kasih telah belajar dari setiap kesalahan. Terima Kasih untuk berusaha menjadi lebih baik. Whatever the result, be proud of every process you have gone through, appreciate for continiuing to try to be better.*

Akhirnya saya sebagai penulis mengharap semoga tugas akhir ini merupakan langkah awal penemuan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik, yang kemudian dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap orang yang membacanya, serta juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi.

ABSTRAK

Muh. Alif Fauzan Syah E041201029. Politik Etnis Minoritas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kota Makassar. Dibawah bimbingan Gustiana A. Kambo sebagai pembimbing utama dan Muh. Imran sebagai pembimbing pendamping.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah partai politik yang berideologi Pancasila sebagai bentuk ideologi nasionalis. Kajian Politik etnis PDI-P kota Makassar menganut paham yang inklusif dan anti-diskriminasi. PDI-P percaya bahwa semua orang Indonesia, tanpa memandang etnis, ras, atau agama, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. PDI-P tidak memandang politik etnis sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan bangsa. Politik etnis dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat, tetapi PDI-P berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan etnis minoritas dalam kepengurusan dan kaderisasi PDI-P kota Makassar dengan pengambilan data melalu wawancara informan yang dapat menjelaskan keberadaan etnis minoritas pada PDIP kota Makassar. Data tersebut kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif yang yang mengambarkan fenomena yang menjadi focus penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengurus dan kader PDIP kota makassar tidak memandang status etnis apalagi agama sehingga baik pengurus maupun kader terdapat berbagai etnis yang ada seperti etnis bugis dan makassar yang merupakan etnis mayoritas sedang etnis Toraja, Cina, dan manado merupakan etnis minoritas, Keberadaan etnis minoritas yang juga mendapat posisi sebagai pengurus dan kader terdapat 4 orang dalam kepengurusan dan kader yang ada. pengaruh yang dimiliki keberadaan etnis minoritas dalam kepengurusan dan kader diantaranya dapat menjaring suara Masyarakat etnis tersebu tbaik dalam simpatisan maupun dalam perolehan suara diparlemen, hal ini terlihatk Keberadaan etnis minoritas dapat mendudukan 3 orang terpilih sebagai anggota perlemen kota makassar yaitu Mesakh Raymond Rantepadang, S.H. dan Galmerrya Kondorura serta William, S.E, sedangkan angota Parlemen kota Makassar atas nama Anton Paul Goni yang merupakan etnis manado yang terpilih pada pileg 2019, hal ini menujukkan bahwa PDIP kota masyarakat dapat meraih suara masyarakat minoritas toraja dan cina, sedangkan etnis minoritas didominasi bugis dan makassar.

Kata Kunci : Partai Politik dan etnis minoritas

ABSTRACT

Muh. Alif Fauzan Syah E041201029. Ethnic Minority Politics of the Indonesian Democratic Party of Struggle in Makassar City. Under the guidance of Gustiana A. Kambo as the main supervisor and Muh. Imran as co-supervisor.

The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) is a political party whose ideology is Pancasila as a form of nationalist ideology. Ethnic political studies, PDI-P adheres to inclusive and anti-discrimination ideology. PDI-P believes that all Indonesians, regardless of ethnicity, race, or religion, have the same right to participate in politics. PDI-P views ethnic politics as one of the factors that can hinder national development. Ethnic politics can cause conflict and division in society. Therefore, PDI-P is committed to creating an inclusive and just society, where everyone has equal opportunities to work.

This research aims to analyze the existence of ethnic minorities in the management and cadre of PDI-P Makassar city using data collection techniques through informant interviews which can explain the existence of ethnic minorities in PDIP Makassar city. The data is then analyzed using qualitative analysis which describes the phenomenon that is the focus of the research

The results of the research show that the recruitment pattern for PDIP administrators and cadres in Makassar City does not look at ethnic status, let alone religion, so that both administrators and cadres have various ethnicities, including the Bugis and Makassar ethnicities which are the majority ethnicities, while the Toraja, Chinese and Manado ethnic groups are minority ethnicities. Ethnic minorities who also have positions as administrators and cadres constitute around 4 people of the number of existing administrators. The advantages of having ethnic minorities in management and cadres include being able to attract people's votes. The existence of ethnic minorities can result in 3 people being elected as members of the Makassar city parliament, namely Mesakh Raymond Rantepadang, S.H. and Galmerrya Kondorura and William, S.E, while the council member Anton Paul Goni, who is an ethnic Manadonese, was elected in the 2019 legislative election. This shows that the PDIP city community can win the votes of the Toraja and Chinese people apart from the Bugis and Makassar ethnic groups themselves who are ethnic majority.

Keywords : Political parties and ethnic minorities

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG : 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 7
1.3 TUJUAN PENELITIAN 7
1.4 MANFAAT PENELITIAN 7

BAB II 8

TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 PENDEKATAN NEO-INSTUTISIONALISME. 8
2.2 KONSEPTUALISASI IDENTITAS POLITIK 10
2.2.1 Identitas Politik 10
2.2.2 Etnisitas 12
2.2.3 Identitas Partai Politik 13
2.3 KADERISASI PARTAI POLITIK. 15
2.3.1 Kader Partai Politik 15
2.4 PENGARUH ETNIS TERHADAP PARTAI POLITIK 18
2.5 KERANGKA BERPIKIR 21
2.6 SKEMA PENELITIAN 22
Gambar 2.7.1 22

BAB III 23

METODE PENELITIAN 23

3.1 JENIS PENELITIAN : 23
3.1.1 pendekatan penelitian 23
3.1.2 Tipe Penelitian 23
3.1.3 Jenis Penelitian 24

3.2 LOKASI PENELITIAN DAN OBJEK PENELITIAN 24
3.2.1 Lokasi penelitian 24
3.2.2 Objek Penelitian 25
3.3 JENIS DAN SUMBER DATA 25
3.3.1 Data Primer 25
3.3.2 Data Sekunder 25
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 26
3.4.1 Wawancara : 26
3.4.2 Observasi 27
3.4.3 Dokumentasi 27
3.5 INFORMAN DATA 27
3.6 TEKNIK ANALITIK DATA : 28
3.6.1 Reduksi Data 28
3.6.2 Penyajian Data 29
3.6.3 Penarikan Kesimpulan 29

BAB IV 30

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 30

4.1 GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR 30
4.2.1 Sejarah Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) 36
4.2.2 Visi dan Misi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) 39
4.2.3 Profil PDI-P Kota Makassar 42

BAB V 45

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 45

5.1. KEBERADAAN ETNIS MINORITAS DALAM KEPENGURUSAN PARTAI PDI-P KOTA MAKASSAR. 45
5.2 PDI-P KOTA MAKASSAR DALAM MENEMPATKAN KADER ETNIS MINORITAS KE DALAM STRUKTUR KEPARTAIAN 52

BAB IV 59

PENUTUP 59

A. KESIMPULAN 59
B. SARAN 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN 66

DOKUMENTASI WAWANCARA 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang :

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuk yang berideologi Pancasila, namun pasca reformasi kehidupan bangsa Indonesia menghadapi tantangan salah satunya adalah merebaknya politik identitas yang mengedepankan identitas golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Politik identitas pada awalnya muncul pada tahun1970-an di Amerika Serikat untuk tuntutan perjuangan minoritas ,gender, ras yang merasa terpinggirkan. Dalam sejarah manusia digerakan oleh perjuangan untuk pengakuan. Satu-satunya solusi rasional untuk hasratakan pengakuan universal ketika martabat setiap manusia dihargai. Adanya pengakuan universal ini mendapatkan tantangan lewat bentuk-bentuk pengakuan parsial lain berdasarkan bangsa, agama, sekte, ras, etnis, jenis kelamin, atau individu yang ingin diakui sebagai superior.

Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik Indonesia yang sangat beragam tidak terlepas dari ketidakadilan dan kesetaraan yang dituntut oleh masing-masing kelompok atau kelas sosial tertentu. Terlebih lagi, perbedaan yang menjadi ukuran terpenting kebhinekaan Indonesia membuat politik identitas Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Mengabaikan konflik yang mendasari politik identitas yang berbeda menyebabkan ketidakstabilan negara.

Berbeda dengan identitas politik, identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik.

Identitas politik mengacu pada cara di mana seseorang mengidentifikasi dirinya secara politik, termasuk partai politik, pandangan politik, dan posisi politik.[1]

Menurut pakar politik, Muradi, P.hD menguraikan Identitas politik sebagai basis awal seseorang untuk bisa menjadikan dirinya menjadi bagian dari komunitas politik. Dalam hal ini, Identitas politik menempatkan dan menentukan posisi kepentingan suatu individu atau aktor politik untuk dapat berperan atau berpartisipasi di dalam suatu ikatan kelompok politik. Hal inilah yang kemudian menjadi bagaimana seseorang atau sekelompok orang memikirkan diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan suatu negara. Segala sesuatu yang membentuk rasa diri kita adalah komponen dari identitas politik.

Etnis mengacu pada pola karakter yang dimiliki oleh suku bangsa ras tertentu. Oleh karena itu etnisitas seringkali dianggap sebagai budaya oleh Phninney. Dengan kata lain, jika kita membicarakan etnisitas maka kita tidak bias melepaskan diri dari pembicaraan mengenai budaya etnis yang bersangkutan. Asumsi yang paling umum dipakai adalah bahwa norma-norma, nilai-nilai, sikap-sikap, dan prilaku yang ditampilkan oleh individu kelompok etnis tertentu merepukan tripikal etnis yang bersangkutan di mana individu itu berasal. Perilaku tripikal tersebut berakar pada budaya yang sudah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.[2]

Dengan menjelaskan sebagaimana manusia sebagai mahkluk yang memiliki identitas, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik. Karena hak politik

---

[1] identitas Politik dalam Komunikasi Politik Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/1382

[2] Zakso Amrazi, “Pelestarian dan Alkulturasi Adaptasi Budaya Daerah Singkawang”, Jurnal Sosiologi dan Humaniora Vol.3 No.2 Tahun 2012, Hlm 5.

merupakan bagian dari hak kebebasan pribadi, maka hak yang mewajibkan seseorang untuk menggunakan hak politiknya secara bebas menurut Pasal 23 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Dalam hal ini Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi . Oleh karena itu, partisipasi politik merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Isu etnisitas dalam partai politik menjadi penting karena dapat mempengaruhi keterwakilan politik di suatu daerah atau negara. Politik identitas etnis dapat menjadi faktor penentu bagi elit lokal untuk mendapatkan kekuasaan. Persaingan politik yang didasarkan pada etnis dan agama dalam politik lokal dapat mempengaruhi keterwakilan politik di suatu daerah. Selain itu, politik identitas etnis juga dapat menjadi penyebab terjadinya konflik internal dalam partai politik. Oleh karena itu, peran partai politik dalam mengatasi identitas politik dan memperjuangkan keterwakilan politik yang adil dan merata menjadi penting dalam pemilihan umum.

Dengan menghubungan politik identitas etnis dalam proses kaderisasi partai politik, tentu memiliki alasan yang tertentu maupun alasan yang umum. Keterwakilan politik yang tidak merata dan adil bagi seluruh masyarakat dapat memicu terjadinya politik identitas etnis dalam proses kaderisasi partai politik. Adanya kepentingan politik tertentu yang ingin diwakili oleh partai politik dalam proses kaderisasi, Hal ini bertujuan untuk memperkuat basis massa partai politik dengan memanfaatkan identitas etnis sebagaimana adanya keinginan untuk memperoleh dukungan politik

dari kelompok etnis tertentu. untuk memperoleh keuntungan politik dari kelompok etnis tertentu.[3]

Dalam mengacu bagaimana cara seseorang mengindentifikasi dirinya menjadi bagian dari kederisasi partai politik dengan menempatkan posisinya dalam partai politik atas subjek Identitas . Sebagaimana bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana keberadaan partai politik ialah sebagai pilar demokrasi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah partai politik yang berideologi Pancasila dan. Dalam melihat politik etnis, PDI-P menganut paham yang inklusif dan anti-diskriminasi. PDI-P percaya bahwa semua orang Indonesia, tanpa memandang etnis, ras, atau agama, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. PDI-P memandang politik etnis sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pembangunan bangsa. Politik etnis dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, PDI-P berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk maju. PDI-P menerapkan paham inklusif dan anti-diskriminasi dalam berbagai kebijakannya. Misalnya, PDI-P mendorong adanya keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas dalam pemerintahan. PDI-P juga mendukung

[3] Susi Rohayati, Husni Kurniawati, Muhamad Nafi Uz Zaman Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. (2020). IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DALAM REKRUTMEN PARTAI POLITIK UNTUK MENANGGULANGI ARUS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA. 7-14.

kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis.

PDI-P di kota makassar dalam perekrutan beberapa kader dengan berbagai macam etnis sehingga terlihat ada etnis minoritas yang terbentuk inklusivitas dengan memberikan ruang bagi anggotanya dari latar belakang dan perspektif yang berbeda untuk berpartisipasi di dalam partai. Hal ini dapat mencapai mekanisme seperti kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi keterwakilan kelompok dalam posisi minoritas. Berdasarkan data di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Makassar, Pengurus DPC PDI-P kota Makassar berjumlah 19 orang, PAC (Pengurus anak cabang) berjumlah 9 orang masing-masing per-15 kecamatan di kota Makassar, pengurus ranting partai tingkat kelurahan sejumlah 153 orang, dan jumlah keseluruhan kader PDI-P kota Makassar ialah 10.228. berdasarkan rujukan data tersebut maka peneliti akan mencari tahu tentang pengaruh etnik minotritas dalam kadernya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kota Makassar.

Namun, PDI-P adalah partai yang memiliki kader minoritas yang tidak seperti partai-partai besar lainnya di kota makassar sangat di dominasi oleh kader etnis mayoritas. Hal ini dianggap tidak mewakili keberagaman masyarakat dan dapat memperkuat polarisasi etnis dalam masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam representasi politik dan dapat mempengaruhi kredibilitas partai politik tersebut. Selain itu, partai politik yang hanya merekrut kader dari satu etnis atau kelompok tertentu dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh dukungan dari kelompok minoritas dan dapat menghalangi potensi partai politik tersebut untuk memenangkan pemilu.. Sebaliknya, partai politik yang menganut

prinsip pluralisme dan inklusivitas dan banyaknya merekrut kader etnis minoritas dapat memperkuat representasi politik dan memperluas basis dukungan partai politik tersebut

Sementara itu, pengurus partai demokrasi indonesia perjuangan kota makassar yang terpilih menjadi anggota dewan di DPRD kota Makassar periode 2019-2024 berjumlah 6 orang. Namun, 4 orang diantaranya merupakan etnis minoritas yaitu, ANTON PAUL GONI yang berasal dari etnis Manado, GALMERRYA KONDORURA yang berasal dari etnis Toraja, William, SE yang berasal dari etnis cina, MESAKH RAYMOND RANTEPADANG, SH yang berasal dari etnis Toraja. Sehingga, terlihat bahwa PDI-P kota Makassar memberikan ruang kepada kader etnis minoritas

Oleh karena itu, peneliti akan melihat PDIP lebih mendalam terkait penyediaan ruang etnis minoritas untuk mengetahui apakah hal tersebut bisa menjadi strategi atau bahkan maksud tertentu yang akan menguntungkan PDIP itu sendiri. Dari latar belakang ini maka judul penelitiaan ini akan meneliti tentang **POLITIK ETNIS MINORITAS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MAKASSAR.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari Uraian penjelasan Latar Belakang di atas, Maka rumusan Masalah yang akan di angkat pada Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana keberadaan etnis minoritas dalam kepeengurusan dan kader PDIP di kota Makassar ?
2. Bagaimana PDI-P kota Makassar menempatkan kader etnis minoritas ke dalam struktrur kepartaian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keberadaan etnis minoritas dalam kepengurusan PDI-P kota Makassar
2. Untuk mengetahui bagaimana PDI-P menempatkan kader etnis minoritas ke dalam struktrur kepartaian

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis :

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang dalam rangka peningkatan ilmu politik.

2. Manfaat Praktis :

   Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi Khayalak publik khususnya terkait identitas politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Neo-Instutisionalisme.

Pendekatan neo-institusional merupakan kajian yang membahas mengenai institusi dari sisi formal dan informal secara bersamaan. Fokus dari pendekatan ini adalah melihat faktor pendorong dan penghambat dalam perubahan kelembagaan, serta interaksi yang terjadi antar institusi. pendekatan ini memiliki kesamaan perspektif dengan pendekatan institusional bahwa institusi merupakan pusat dari fenomena sosial politik. pendekatan institusional menjelaskan bagaimana pilihan yang disengaja dan tidak disengaja mengarahkan institusi untuk mencerminkan norma, nilai, dan ideologi organisasi. *Neo-Institutionalism Approach* berangkat dari Institutionalism yang dimana tindakan manusia lebih ditentukan oleh institusi yang melingkupinya. Perkembangan mulai dari institusionalis pertama, seperti Meyer dan Rowan pada tahun 1977, kemudian disusul Di Maggio dan Powel yang pada tahun 1983 telah mengkombinasikan agensi dan perubahan dengan keaslian, stabilitas, dan isomorfisme (Vargas-Hernández, 2008).

Pendekatan *neo-institusionalisme* adalah salah satu pendekatan dalam ilmu politik yang menekankan pentingnya institusi dalam memahami proses politik. pendekatan ini berangkat dari teori institusionalisme yang mengatakan bahwa tindakan manusia lebih ditentukan oleh institusi yang melingkupinya. pendekatan *neo-institusionalisme* memiliki kesamaan perspektif dengan pendekatan institusionalisme bahwa institusi merupakan pusat dari fenomena sosial politik. pendekatan ini membahas mengenai institusi dari sisi formal dan informal secara

bersamaan. Fokus dari teori ini adalah melihat faktor pendorong dan penghambat dalam perubahan kelembagaan, serta interaksi yang terjadi antar institusi. pendekatan ini juga mengusahakan penataan ruang publik di bawah institusi untuk meniadakan kesetaraan ekonomi, sosial, dan politik yang semu. Institusi memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan dan pilihan negara, sehingga dapat mengatur perilaku para aktor.

Beberapa elemen penting dalam pendekatan Neo-institusional antara lain:

1. Institusi: memberikan aturan-aturan yang harus diikuti oleh organisasi dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya dan dalam keterlibatannya dalam persaingan. Institusi juga akan mempengaruhi perilaku dan pandangan yang dimiliki oleh para pelaku dalam organisasi secara individual.
2. Organisasi: merupakan bagian dari institusi dan harus menyesuaikan diri dengan standar yang mudah dikenali dan diterima dalam bidang organisasi, untuk membantu mendorong legitimasi suatu organisasi.
3. Pelaku: mempengaruhi institusi dengan cara membuat atau melakukan transformasi pada institusi yang telah ada menjadi bentuk institusi baru. Dengan demikian institusi memberikan pilihan-pilihan tindakan yang merupakan batasan yang harus dihadapi pelaku dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan neo-institusionalisme juga dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana sebuah organisasi menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam organisasinya. pendekatan ini juga membantu pemahaman kita tentang adanya tekanan agar institusi menjadi lebih mirip, yang menurunkan keragaman institusional.

2.2 Konseptualisasi Identitas Politik

2.2.1 Identitas Politik

Marcia (Parsons, 2007) mendefinisikan identitas sebagai struktur dalam diri, konstruk diri serta dinamika diri atas dorongan, kemampuan, keyakinan dan sejarah yang terekam dalam diri manusia. Pencapaian identitas diri yang baik adalah ketika individu mampu menyadari akan perbedaan dan kesamaan yang dimiliki diri dengan orang lain. Namun pencapaian identitas diri yang buruk adalah ketika individu mengalami kebingungan dan tidak dapat membedakan perbedaan yang ada dalam diri mereka dengan orang lain. Proses pencapaian identitas terjadi pada tahap usia remaja hingga dewasa awal yang didasarkan pada pengalaman proses eksplorasi dan pembuatan komitnen. Maka menjadi penting bagi remaja/dewasa awal untuk mengoptimalkan proses eksplorasi indentitas diri sehingga dapat menciptakan keyakinan dalam pembuatan komitmen kelak.

Dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik *(political indetity*) dengan politik identitas *(political of identity) political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek didalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Habodin, 2012). Identitas politik (political identity) merujuk pada cara seseorang atau kelompok orang memandang diri mereka dalam hubungannya dengan politik dan pemerintahan suatu negara. Identitas politik mencakup etnis, agama, gender, kelas sosial, ideologi, kewarganegaraan, dan bahkan usia dan generasi.

Identitas politik mengacu pada cara di mana seseorang mengidentifikasi dirinya secara politik, termasuk partai politik, pandangan politik, dan posisi politik. Identitas politik seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor identitas lainnya, seperti agama, suku, ras, dan etnis. Politik identitas dapat mempengaruhi preferensi pemilih dengan identitas mereka dengan partai politik atau kandidat tertentu. Hal ini dapat memperkuat solidaritas dan identitas kelompok, membuat pemilih merasa terhubung dan mewakili nilai-nilai, kepentingan, atau aspirasi mereka. Politik identitas juga dapat mempengaruhi agenda politik dengan mengarahkan perhatian terhadap isu-isu yang relevan bagi kelompok identitas tertentu.

Konsep identitas politik merujuk pada cara individu mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik dan bagaimana identitas ini mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku politik mereka. Identitas politik dapat sangat mempengaruhi cara seseorang memandang isu-isu politik, memilih calon politik, dan berpartisipasi dalam proses politik. Berikut adalah beberapa komponen dan aspek penting dalam konsep identitas politik. Faktor-faktor seperti ras, agama, etnisitas, gender, dan orientasi seksual dapat menjadi dasar bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka.

Identitas politik memiliki beberapa titik fokus yang membantu dalam memahami bagaimana individu mengidentifikasi diri dalam konteks politik dan bagaimana identitas ini mempengaruhi pandangan serta perilaku politik mereka. Salah satu titik fokus utama adalah identitas sosial individu, yang mencakup etnisitas, agama, ras, gender, orientasi seksual, budaya, dan atribut sosial lainnya. Identitas sosial memainkan peran penting dalam membentuk pandangan politik individu

karena pengalaman dan persepsi terkait identitas ini dapat mempengaruhi prioritas politik dan kebijakan yang didukung.

2.2.2 Etnisitas

Etnis adalah sebuah kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu ethnos yang merujuk pada orang atau bangsa. Etnis adalah suatu istilah yang menunjuk rasa kepemilikan bersama, yang berdasarkan pada kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, budaya, ras, atau agama (atau percampuran dari daftar tersebut). Etnisitas Merujuk pada identitas kelompok kemasyarakatan yang memberikan kesadaran kolektif dan identitas sosial pada individu. Konsep ini lebih bersifat kultural daripada ras, lebih mengacu pada komunitas keyakinan kultural dan praktik kebudayaan. Etnisitas dapat tercermin dalam berbagai aspek budaya, seni, dan, tradisi.

Etnis dalam politik Merujuk pada pengaruh identitas etnis dalam proses politik, seperti dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Dalam konteks politik elektoral, etnisitas dapat mempengaruhi perilaku pemilih, di mana masyarakat cenderung memilih kandidat yang memiliki kesamaan identitas dengan mereka, baik itu agama maupun etnis. Selain itu, etnisitas juga dapat dimobilisasi dan digunakan sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan oleh elit-elit lokal

Etnisitas mayoritas merujuk pada kelompok etnis yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya di suatu wilayah atau negara. Dalam konteks politik, etnisitas mayoritas dapat mempengaruhi perilaku pemilihan kepala daerah karena masyarakat mayoritas cenderung memilih kandidat yang memiliki kesamaan identitas dengan mereka, baik itu agama maupun etnis..

Sedangkan Konsep minoritas dapat merujuk pada kelompok etnis, agama, atau budaya yang memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok mayoritas di suatu wilayah atau negara. Dalam konteks politik, minoritas sering kali menghadapi tantangan seperti diskriminasi atau pengabaian oleh pemerintah atau masyarakat mayoritas. konsep minoritas juga dapat dilihat dari sudut pandang multikulturalisme, di mana semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kehidupan

2.2.3 Identitas Partai Politik

Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovani Sartori partai politik adalah suatu kelompok poloitik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Identitas partai politik dapat dijelaskan sebagai identitas yang dimiliki oleh partai politik, yang mencakup pandangan politik, ideologi, program, dan nilai-nilai yang dianut oleh partai politik tersebut. Identitas partai politik dapat mempengaruhi preferensi pemilih dengan identitas mereka dengan partai politik tertentu. Identitas

partai politik juga dapat mempengaruhi agenda politik dengan mendorong perhatian terhadap isu-isu yang relevan bagi partai politik tersebut. [4]

Identitas partai politik adalah cara partai mengidentifikasi dirinya sendiri dan cara mereka dikenali oleh pemilih dan masyarakat umum. Identitas ini mencakup berbagai elemen yang membantu pemilih dan pihak-pihak yang terlibat dalam politik untuk memahami apa yang mewakili partai tersebut dan apa yang dapat diharapkan dari partai tersebut. Beberapa elemen yang membentuk identitas partai politik meliputi:

1. Ideologi adalah dasar pemikiran dan prinsip yang membimbing partai politik. Partai-partai sering diidentifikasi dengan ideologi tertentu, seperti konservatif, liberal, sosialis, atau libertarian. Ideologi ini mengatur posisi partai pada berbagai isu politik dan sosial.
2. Platform politik adalah panduan atau agenda partai yang berisi posisi mereka tentang berbagai isu, seperti ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Platform ini memberikan gambaran tentang kebijakan-kebijakan yang akan diperjuangkan oleh partai jika mereka berkuasa.
3. Sejarah dan Tradisi. Identitas partai politik juga terkait dengan sejarah partai tersebut dan tradisi yang telah mereka bentuk seiring waktu. Sejarah partai, pencapaian masa lalu, dan tokoh-tokoh penting dapat menjadi bagian penting dari identitas mereka.

---

[4] WAHYU, Y. (2022, februari 22). Diambil kembali dari Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/riset/2022/02/22/memahami-identitas-kepartaian-dan-pemilih-partai

4. Logo dan Simbol. Dalam hal ini Partai politik sering memiliki logo atau simbol yang mudah dikenali. Simbol-simbol ini dapat mencakup lambang-lambang tertentu atau warna-warna yang mewakili partai tersebut.
5. Pemimpin partai, terutama ketua partai atau kandidat utama mereka dalam pemilihan, juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk identitas partai. Pemimpin sering menjadi wajah partai dan mempengaruhi citra dan pesan partai.
6. Elektorat Sasaran, Identitas partai politik juga mencakup elektorat sasaran atau basis pemilih yang mereka usahakan. Beberapa partai mungkin fokus pada segmen tertentu dari populasi, seperti pekerja buruh, pemilih muda, atau kalangan bisnis, dan ini juga menjadi bagian dari identitas mereka.
7. Kampanye dan Komunikasi. Dalam hal ini pesan dan kampanye politik yang dilakukan oleh partai juga mencerminkan identitas mereka. Cara mereka berkomunikasi dengan pemilih dan pesan-pesan yang mereka sampaikan dapat memperkuat identitas partai.

2.3 Kaderisasi Partai Politik.

2.3.1 Kader Partai Politik

Kader partai politik adalah anggota partai politik yang memiliki peran penting dalam organisasi partai politik dan kontestasi politik. Kader partai politik memiliki tugas untuk memperjuangkan ideologi, program, dan nilai-nilai partai politik yang dianut. Kader partai politik juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas partai politik, seperti rekrutmen anggota, kampanye, dan pengawasan pemilihan

umum.[5] Berikut adalah tanggung jawab kader partai politik dalam menjalankan tugas-tugas partai politik yaitu :

1. Kader partai politik bertanggung jawab dalam melakukan rekrutmen anggota partai politik yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ideal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan politik bagi kader partai politik agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam organisasi partai politik.
2. Kader partai politik juga bertanggung jawab dalam melakukan kampanye partai politik dan memperkenalkan program dan nilai-nilai partai politik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi program partai politik melalui media sosial, pertemuan dengan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
3. Kader partai politik juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pemilihan umum dan memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum, mengawasi penghitungan suara, dan melaporkan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum.

Kader partai politik harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang politik, seperti kemampuan berkomunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi kader partai politik menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan organisasi partai politik. Kaderisasi

[5] Syamsuddin Haris. (2016). PANDUAN REKRUTMEN & KADERISASI PARTAI POLITIK IDEAL DI INDONESIA .

juga menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena kaderisasi merupakan bentuk upaya-upaya mendukung terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan untuk menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin di masa depan.[6]

Pendidikan politik bagi kader partai politik bertujuan agar para kader mengetahui tujuan berdirinya partai politik, ideologi yang dianut, serta program dan nilai-nilai partai politik. Hal ini dapat membantu kader partai politik untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam organisasi partai politik. Pendidikan politik bagi kader partai politik juga dapat membantu kader partai politik untuk memahami karakteristik pemilih dan memperkuat identitas partai politik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi pemilih. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan workshop kepada kader partai politik mengenai strategi kampanye dan sosialisasi program partai politik.

Untuk memperkuat identitas partai politik, partai politik harus melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang tepat dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ideal. Partai politik juga harus memperhatikan kualitas pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik agar dapat memperkuat performa partai politik dan menghindari politik kekerabatan yang merusak saluran kaderisasi.[7] Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik harus dilakukan dengan cara yang transparan, adil, dan berkeadilan. Hal ini dapat membantu partai

---

[6] syamsuddin Haris. (2016). PANDUAN REKRUTMEN & KADERISASI PARTAI POLITIK IDEAL DI INDONESIA .

[7] Harahap, I. H. (2020). KADERISASI PARTAI POLITIK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPEMIMPINAN NASIONAL. 5-9.

politik untuk memperkuat integritas organisasi dan memperkuat posisi partai politik dalam kontestasi politik.

Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik harus memperhatikan kualitas kader yang dihasilkan untuk dipilih dalam pengisian posisi kepemimpinan. Hal ini dapat membantu partai politik untuk memperkuat performa partai politik dan memperkuat posisi partai politik dalam kontestasi politik. Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik harus menghindari politik kekerabatan yang merusak saluran kaderisasi. Hal ini dapat membantu partai politik untuk memperkuat integritas organisasi dan memperkuat posisi partai politik dalam kontestasi politik. Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik harus memperhatikan transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan visi, misi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Hal ini dapat membantu partai politik untuk memperkuat performa partai politik dan memperkuat posisi partai politik dalam kontestasi politik.[8]

2.4 Pengaruh etnis terhadap Partai Politik

Pengaruh etnis terhadap partai politik dapat terjadi dalam beberapa hal, seperti politik identitas etnis dalam proses kaderisasi partai politik, adanya kepentingan politik tertentu yang ingin diwakili oleh partai politik dalam proses kaderisasi, keinginan untuk memperkuat basis massa partai politik dengan

[8] HARTONI, M. R. (2021). POLA KADERISASI PARTAI POLITIK DI PROVINSI LAMPUNG (STUDI PADA PARTAI PERINDO DAN PARTAI BERKARYA). *SKRIPSI* , 23-79.

memanfaatkan identitas etnis, keinginan untuk memperoleh dukungan politik dari kelompok etnis tertentu, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan politik dari kelompok etnis tertent.[9] Pengaruh etnis terhadap partai politik dapat dilihat dari sudut pandang politik identitas etnis. Politik identitas etnis adalah suatu bentuk politik yang muncul sebagai reaksi terhadap adanya diskriminasi dan kesenjangan, serta muncul sebagai kesadaran politik untuk melawan kelompok dominan yang memiliki privilege ekonomi dan politik.

Konsep etnis dalam partai politik dapat dilihat dari sudut pandang politik identitas etnis:

1. Politik identitas etnis adalah suatu bentuk politik yang muncul sebagai reaksi terhadap adanya diskriminasi dan kesenjangan, serta muncul sebagai kesadaran politik untuk melawan kelompok dominan yang memiliki privilege ekonomi dan politik. Politik identitas etnis dapat memicu terjadinya konflik keragaman seperti konflik antar etnis, budaya, ras, dan agama yang ditunggangi oleh partai politik.
2. Identitas etnik adalah sesuatu yang problematik ketika dihadapkan dengan komunikasi politik, terutama dalam sistem pemilu yang demokratis. Identitas etnik dapat menjadi pembeda atau ko-identifikasi bagi pihak-pihak yang menggunakannya untuk tujuan meraih dukungan politik.
3. *Power-sharing* yang menujukkan praktik politik etnis secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor

[9] Sianturi, K. A. (2015). MEMPERKUAT FUNGSI REKRUTMEN PARTAI POLITIK (STRENGTHENING THE RECRUITMENT FUNCTION OF POLITICAL PARTY). 15-22.

politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain. Power-sharing merupakan salah satu bentuk politik identitas etnis yang digunakan oleh partai politik.

4. *Civic education* dan *political recruitment*: Kedua hal ini merupakan fungsi partai politik di daerah yang terkadang tidak mampu dijalankan dengan baik. Ada kesan bahwa partai politik hanya berfungsi sebagai kendaraan untuk meloloskan kandidat tertentu dalam momen pilkada.
5. Penggolongan manusia berdasarkan perbedaan: Secara operasionalnya, politik identitas etnis adalah konsep kunci dalam arena politik yang memanfaatkan penggolongan manusia berdasarkan perbedaan yang disebabkan oleh ketimpangan atau ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, kekuasaan, wilayah, peluang kerja.

Dalam politik identitas etnis, partai politik dapat membantu mengatasi politik identitas dalam pemilihan umum dengan memperhatikan hak-hak minoritas dalam program-program politiknya, menggunakan *power-sharing* sebagai bentuk politik identitas etnis, dan memperhatikan partisipasi politik minoritas. Kader etnis minoritas di partai politik dapat menjadi penting dalam mengatasi politik identitas etnis dalam pemilihan umum. Dalam politik identitas etnis, partai politik dapat membantu mengatasi politik identitas dalam pemilihan umum dengan melakukan pendidikan politik oleh partai politik yang berbasis populisme Pancasila serta rekonstruksi hubungan antar etnis

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Kerangka berpikir banyak digunakan untuk mempermudah penulis untuk menyelesaikan karya tulis baik itu karya tulis kreatif maupun penelitian. Kerangka berpikir juga dapat dianggap sebagai visualisasi dalam bentuk diagram yang saling berhubungan. Dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian bisa dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Politik etnis minoritas di partai PDIP kota Makassar pada dapat melihat bagaimana pengaruh peran etnis minoritas di partai PDIP kota Makassar.

Dengan mengacu pada pendekatan Neo-institusionalisme, dalam ilmu politik. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pengaruh identitas etnis di dalam Lembaga ini menunjukkan perannya untuk menjawab persoalan politik etnis minoritas di partai PDIP kota Makassar.

2.6 Skema Penelitian

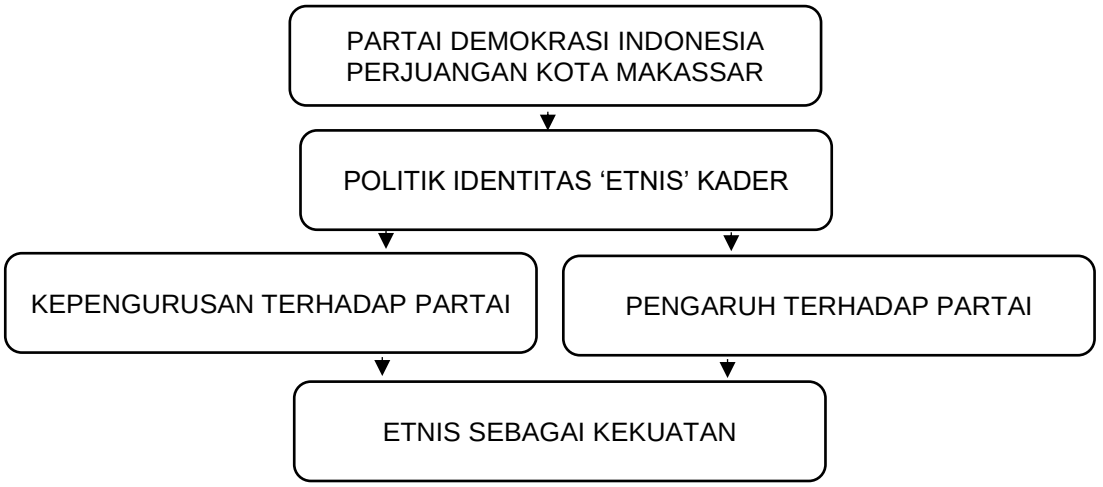

Gambar 2.7.1